

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LUMPUE KOTA PAREPARE  
TAHUN 2023-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Parepare tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lumpue Kota Parepare Tahun 2023-2028;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);  
5. Peraturan Walikota Parepare Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LUMPUE KOTA PAREPARE TAHUN 2023-2028.

BAB I .....

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Parepare.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas Lumpue yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah salah satu dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan memperhatikan dan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
10. Fleksibilitas adalah keleluasan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Puskesmas Lumpue pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
- b. memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan;
- c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
- d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan; dan
- e. memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Pasal .....

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi misi Puskesmas Lumpue untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang; dan
- b. sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Renja tahunan Puskesmas Lumpue.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. Renstra; dan
- b. Pelaksanaan.

## BAB III RENSTRA

### Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas Lumpue menyusun Renstra 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.
- (2) Pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada peningkatan pelayanan masyarakat, efisiensi, efektifitas, produktifitas berdasarkan praktek bisnis yang sehat tanpa mengutamakan pengambilan keuntungan.
- (3) Implementasi Renstra dilakukan dengan memperhatikan fleksibilitas penerapan BLUD.

### Pasal 6

- (1) Renstra merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. rencana pengembangan layanan;
  - b. strategis dan arah kebijakan;
  - c. rencana program dan kegiatan; dan
  - d. rencana keuangan.
- (4) Renstra UPTD Puskesmas Lumpue sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I : PENDAHULUAN  
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan.
  - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PUSKESMAS  
Memuat kondisi umum, tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya dan capaian kinerja Puskesmas.
  - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  
Memuat identifikasi masalah, prioritas masalah, dan penyebab permasalahan dan alternatif permasalahan.

d. BAB IV .....

- d. BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN  
Memuat visi, misi, tujuan, strategi dan arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan.
  - e. BAB V : PROGRAM DAN PENDANAAN INDIKATIF  
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
  - f. BAB VI : PROSEDUR PELAKSANAAN
  - g. BAB VII : PENUTUP  
Memuat kaidah pelaksanaan, dan rangkuman daripada penjelasan bab sebelumnya.
- (5) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB IV PELAKSANAAN

##### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengelolaan UPTD Puskesmas Lumpue berpedoman pada Renstra.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 23 Mei 2023

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 23 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2023 NOMOR 11

LAMPIRAN PERATURAN WALI  
KOTA PAREPARE  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA STRATEGIS  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT LUMPUE KOTA  
PAREPARE

---

### **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Dokumen RSB Persiapan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) UPTD Puskesmas Lumpue tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Puskesmas sebagai salah satu sarana Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat oleh karena itu Puskesmas dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam Rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka UPTD Puskesmas Lumpue akan melakukan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Oleh Karena itu guna memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi BLUD maka UPTD Puskesmas Lumpue menyusun Dokumen RSB.

RSB ini disusun untuk menjamin ketersediaan ,keterjangkauan dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas kepada para pihak. Dengan disusunnya RSB diharapkan memacu Puskesmas untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan dan Kinerja Puskesmas serta memudahkan Puskesmas untuk menentukan strategi dalam pelaksanaannya. Selain itu RSB dapat menjadi pedoman/acuan yang dapat digunakan untuk mengetahui hal-hal yang harus difasilitasi oleh Pemerintah Daerah serta dalam meningkatkan pembinaan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan RSB ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyempurnaan laporan ini sangat kami harapkan.

Harapan Kami dengan adanya laporan RSB ini dapat menjadi bahan rujukan dalam evaluasi proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah guna menjamin akses akan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata sebagai upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan publik secara optimal.

Dokumen.....

Dokumen RSB ini merupakan salah satu syarat dokumen dalam hal terbentuknya BLUD yang telah direncanakan di UPTD Puskesmas Lumpue yang mendapat bimbingan dari Dinas kesehatan Kota Parepare

Pada akhirnya atas perhatiandan kerjasama dari semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Parepare, Desember 2021  
Kepala UPTD Puskesmas Lumpue

Irnawaty, SKM, M.Kes  
NIP.1977029 200312 2 011

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>BAB : Pendahuluan</b> .....	3
A. Latar Belakang.....	03
B. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategi Bisnis (RSB).....	04
C. Tujuan.....	06
<b>BAB II : Gambaran Pelayanan Puskesmas</b> .....	07
A. Gambaran Umum Puskesmas.....	07
B. Gambaran Organisasi Puskesmas.....	09
C. Kinerja Pelayanan Puskesmas.....	11
<b>BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis</b> .....	16
A. Identifikasi Masalah Kesehatan Masyarakat.....	16
B. Penentuan Isu Strategis.....	16
<b>BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan Arah Kebijakan</b> .....	18
A. Visi dan Misi.....	18
B. Tujuan dan Sasaran.....	18
<b>BAB V : Program Pendanaan Indikatif Tahun 2021-2023</b> .....	27
A. Program.....	27
B. Kondisi dan Rencana Manajemem Puskesmas Tahun 2021.....	29
C. Pendanaan Indikatif.....	31
D. Program Puskesmas Lumpue Tahun 2021-2023.....	37
<b>BAB VI : Prosedur Pelaksanaan</b> .....	64
A. Pengorganisasian dan Prosedur Pelaksanaan Program.....	64
B. Penanggungjawab Program.....	65
C. Sistem Mekanisme Evaluasi serta Revisi RSB.....	66
<b>BAB VII PENUTUP</b> .....	67

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan tersebut diselenggarakan dengan berazaskan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus kepada penduduk rentan antara lain: ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut dan keluarga miskin . Hal ini seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Di Indonesia Puskesmas merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama dilahirkan tahun 1968 ketika dilangsungkan rapat kerja nasional (Rakernas) di Jakarta. Waktu itu dibicarakan upaya mengorganisasi sistem pelayanan kesehatan di tanah air, karena pelayanan kesehatan tingkat pertama pada waktu itu dirasakan kurang menguntungkan, dan dari kegiatan-kegiatan seperti BKIA, BP, P4M dan sebagainya masih berjalan sendiri-sendiri dan tidak saling berhubungan. Melalui rakerkesnas tersebut timbul gagasan untuk menyatukan semua pelayanan kesehatan tingkat pertama kedalam suatu organisasi yang dipercaya dan diberi nama Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

UU Praktek Kedokteran dan UU Perlindungan Konsumen mengamanatkan pelaku bidang kesehatan diharuskan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, sesuai kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kebutuhan dan kepuasan selalu berkembang dari waktu ke waktu bahkan bisa berubah secara dinamis sesuai perkembangan dan kemajuan pendidikan, teknologi, epidfemiologi, politis dan keadaan sosial kerja.

Dengan.....

Dengan demikian Puskesmas dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanannya. Untuk meningkatkan mutu pelayanan salah satunya adalah dengan menerapkan PPK di Puskesmas sebagai PPK BLUD.

Puskesmas Lumpue adalah salah satu puskesmas dari 8 puskesmas di Kota Parepare yang terletak di Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat dengan luas wilayah 13 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 6 kelurahan yaitu Lumpue, Sumpang Minangae, Cappagalung, Bumi Harapan, Tirosompe dan Kampung Baru. Jumlah penduduk Kecamatan Bacukiki Barat adalah 45.197 jiwa (berdasarkan data proyeksi Badan Pusat Statistik Kota Parepare tahun 2020). Jumlah kunjungan pasien di wilayah kerja puskesmas Lumpue pada tahun 2021 sebanyak 18.722 kunjungan dengan jumlah pasien umum sebanyak 8.913 kunjungan. Sebesar 46.6 % dari kunjungan 2021 adalah pasien umum. Puskesmas Lumpue memiliki fasilitas gedung yang sudah cukup memadai, namun ketidak leluasaan dalam pengelolaan anggaran menjadi salah satu kendala dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan.

Kendala lain yang membuat puskesmas tidak optimal dalam pelayanan kesehatan yaitu pembiayaan yang sifatnya emergency seperti yang terdapat pada pelayanan di persalinan, poli gigi dan kegawat daruratan. Sebagai gambaran umum, pelayanan di poli gigi hampir keseluruhan pelayanan adalah tindakan dimana setiap tindakan membutuhkan alat atau bahan yg sifatnya habis pakai, sedangkan bahan untuk tindakan gigi di dinas Kesehatan tidak semua tersedia, di pertengahan tahun seringkali bahan untuk pelayanan gigi habis sehingga puskesmas membeli sendiri kebutuhan sengan cara subsidi silang, demikian juga dengan Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan bagian penting dari pelayanan. Seringkali terjadi kondisi dimana pada saat alat ataupun bahan untuk tindakan habis, hal ini tentu akan mengganggu pelayanan.

Dalam menghadapi persaingan global, Puskesmas Lumpue mengubah model manajemen yang konvensional menjadi model pengelolaan publik yang modern melalui BLUD yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.

Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Lumpue merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan Kesehatan yang merupakan penjabaran dari kebijakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi dan misi Puskesmas Lumpue yang akan dilaksanakan langsung oleh Puskesmas Lumpue maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2022-2023. Untuk maksud tersebut perlu dilakukan analisis tentang berbagai aspek yang ada di lingkungan internal maupun eksternal Puskesmas Lumpue dalam bentuk penyusunan Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Lumpue Tahun 2022-2023 sebagai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Kota Parepare.

Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Lumpue Tahun 2022-2023 merupakan penjabaran Renstra Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare 2018-2023 dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD.

#### **B. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB)**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6322);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
17. Peraturan Walikota Parepare Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 68);

**C. Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Lumpue tahun 2022- 2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Puskesmas Lumpue. Adapun tujuan tersebut adalah:

- a. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Parepare dengan Puskesmas Lumpue dan Dinas Kesehatan Kota Parepare, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Puskesmas Lumpue.
- b. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Bisnis Anggaran dan Rencana Kerja Puskesmas Lumpue tiap tahun.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PUSKESMAS

#### A. Gambaran Umum Puskesmas

##### 1. WILAYAH KERJA

Unit kerja : Puskesmas Lumpue Parepare

Kecamatan : Bacukiki Barat

Kelurahan : Lumpue

Alamat : Jalan H.Iskandar No.2

Kode Puskesmas : 7372010101

Akreditasi : Madya

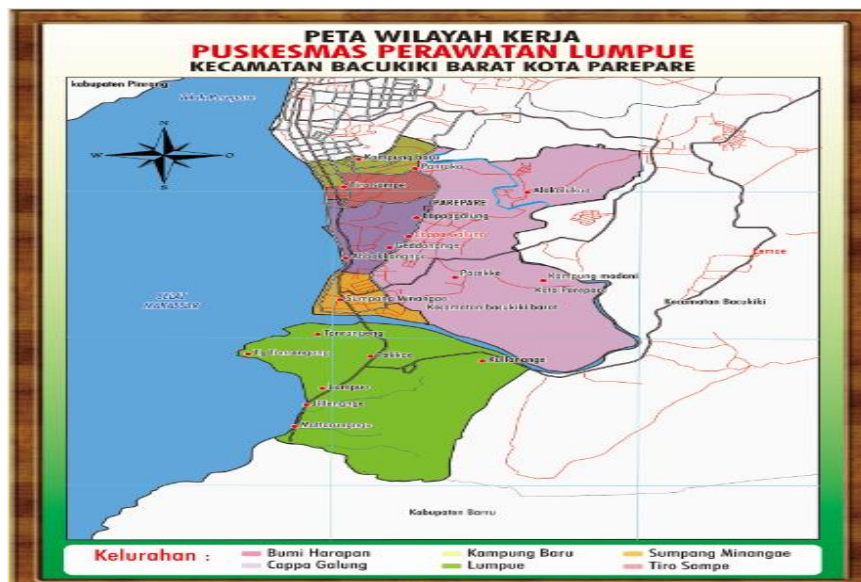
Wilayah kerja Puskesmas Lumpue terbagi dalam 6 wilayah kerja yaitu kelurahan Lumpue, Sumpang Minangae, Cappagalung, Bumi Harapan, Tirosompe dan Kampung Baru. dan terdapat 7 Pustu dan 3 Poskeskel. Adapun batas wilayahnya yaitu:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Barru

Sebelah Utara : berbatasan dengan kecamatan Ujung

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Bacukiki

Sebelah Barat : berbatasan dengan selat makassar



Puskesmas Lumpue yang berlokasi strategis di Jalan H.Iskandar No.2, mudah dijangkau dari berbagai arah baik dengan kendaraan pribadi maupun dengan kendaraan umum. Adapun luas wilayah kerja Puskesmas Lumpue dan rata-rata kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Luas Wilayah.....

Luas wilayah Kerja Puskesmas Lumpue :

<b>No</b>	<b>Kelurahan / Desa</b>	<b>Luas wilayah/ Km<sup>2</sup></b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>
<b>1</b>	<b>Lumpue</b>	4,99	9254
<b>2</b>	<b>Sumpang Minangae</b>	0,31	5231
<b>3</b>	<b>Cappagalung</b>	0,70	7057
<b>4</b>	<b>Tirosompe</b>	0,38	7172
<b>5</b>	<b>Kampung Baru</b>	0,46	5096
<b>6</b>	<b>Bumi Harapan</b>	6,16	11.387

Berdasarkan table tersebut, dapat disimpulkan bahwa wilayah kerja yang paling luas adalah kelurahan Bumi Harapan.

## 2. PELAYANAN PUSKESMAS

Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab Puskesmas Lumpue meliputi:

### a. UKM Esensial :

1. Pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS/UKGS,PKPR.
2. Pelayanan kesehatan lingkungan.
3. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM.
4. Pelayanan gizi yang bersifat UKM.
5. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
6. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat

### b. UKM Pengembangan :

1. Pelayanan kesehatan jiwa.
2. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat.
3. Pelayanan kesehatan Kestrad komplementer.
4. Pelayanan kesehatan olahraga.
5. Pelayanan kesehatan indera.
6. Pelayanan kesehatan lansia.
7. Pelayanan kesehatan kerja.

c. Pelayanan.....

**c. Pelayanan kesehatan Perseorangan / UKP**

Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditunjukkan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat dan memulihkan kesehatan perseorangan. Pelayanan UKP di Puskesmas Lumpue terdiri dari :

**1) UKP, kefarmasian dan laboratorium membawahi :**

- a) Pelayanan pemeriksaan umum
- b) Pelayanan kegawat daruratan (UGD)
- c) Pelayanan kefarmasian
- d) Pelayanan laboratorium
- e) Pelayanan KIA – KB bersifat UKP
- f) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
- g) Pelayanan rawat jalan
- h) Pelayanan Gizi bersifat UKP
- i) Pelayanan MTBS
- j) Pelayanan TB & Kusta

**2) Jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, yang membawahi :**

- a) Puskesmas keliling
- b) Puskesmas pembantu
- c) Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan

**3) Penunjang :**

- a) Loker
- b) Rekam Medik
- c) Ambulance
- d) Pengendalian Penyakit / Infeksi
- e) Laundry
- f) Pemeliharaan
- g) Penanganan Limbah

**B. Gambaran Organisasi Puskesmas**

Komposisi jumlah SDM puskesmas Lumpue sesuai pendidikan adalah sebagai berikut: Tabel 2.1. Komposisi Sumber Daya Manusia di UPTD Puskesmas Lumpue Tahun 2021 :

NO	JABATAN	STATUS PEGAWAI					KET
		PNS	PHT	PTT	PHL	TKS	
1	Kepala Puskesmas	1					1
2	KTU	1					1
3	Dokter Umum	3	1				4
4	Dokter Gigi	1	1				2
5	Perawat Gigi	1				1	2
6	Perawat	11	3			9	23
7	Bidan	6				8	14
8	Apoteker	2	1				3
9	Asisten Apoteker	3				1	4
10	Sanitarian	1					1
11	Gizi	2				1	3
12	Epidemiologi	1	1				2
13	Laboratorium	2					2
14	Administrasi		1			3	4
15	Juru Masak					1	1
16	Supir		1				1
17	Cleaning Service		2				2
<b>JUMLAH</b>		<b>35</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>70</b>

Sumber : Data Kepegawaian Puskesmas Lumpue 2021

Jumlah karyawan di Puskesmas Lumpue ada 70 orang yang terdiri dari 17 jenis jabatan dalam pelayanan kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung (tenaga medis, paramedis dan non kesehatan).

1. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Perkesmas Di Puskesmas Umbulharjo II ada 5 kegiatan esensial dan 1 kegiatan perkesmas. Lima Kegiatan Esensial tersebut meliputi:
  - a. Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan Keluarga Berencana
  - b. Pelayanan Gizi
  - c. Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan
  - d. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
  - e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2. Upaya Perawatan Kesehatan masyarakat Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) merupakan salah satu upaya puskesmas yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan memadukan ilmu/ praktik keperawatan dengan kesehatan masyarakat lewat dukungan peran serta aktif masyarakat mengutamakan pelayanan promotif dan preventif secara berkesinambungan

tanpa.....

tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat untuk ikut meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal sehingga mandiri dalam upaya kesehatannya.

3. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
  - a. Upaya Pelayanan UKGS UKGS adalah suatu komponen dari UKS dan merupakan tehnik pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi anak sekolah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak.
  - b. Upaya Pelayanan Lansia Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
  - c. Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
4. Upaya Kesehatan Perorangan, Farmasi dan Laboratorium
  - a. Upaya Kesehatan Perorangan Upaya kesehatan perorangan di Puskesmas umbulharjo II meliputi : poli umum, poli gigi dan mulut, poli KIA KB dan imunisasi, poli gizi, laboratorium, Farmasi, kasir, loket pendaftaran
  - b. Farmasi Pelayanan Kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah Obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan
  - c. Laboratorium Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat.

### C. Kinerja Pelayanan Puskesmas

Dalam perspektif Proses Bisnis akan diukur kualitas pelayanan (**Quality Of Service**) yang diberikan Puskesmas. Kualitas mutu layanan Puskesmas Lumpue mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

## 1. Upaya kesehatan Perorangan, Farmasi dan Laboratorium

## a. Pelayanan Kesehatan Umum

<b>Pemeriksaan</b>	<b>Jumlah Kunjungan</b>
POLI UMUM	8.913
POLI MTBS	863

## b. Pelayanan Kesehatan Gigi

<b>Pemeriksaan</b>	<b>Jumlah Kunjungan</b>
Pencabutan Gigi	404
Penambalan Gigi	8
Pengobatan Gigi dan jaringan mulut	2
Scalling	0
Perawatan lainnya	544

## c. Pelayanan KIA

<b>Pemeriksaan</b>	<b>Jumlah Kunjungan</b>
ANC (Antenatal Care) dan PNC (Post Natal Care)	1.896
Imunisasi	276
KB	672

## d. Pelayanan Farmasi

<b>Pemeriksaan</b>	<b>Jumlah Kunjungan</b>
Farmasi	15.056

e. Pelayanan.....

## e. Pelayanan Kesehatan Laboratorium

<b>Pemeriksaan</b>	<b>Jumlah Kunjungan</b>
Hematologi	1.357
Kimia Darah	3.588
Parasitologi	761
Imunologi	147
Bakteriologi	2.662
Urinologi	0

## f. Pelayanan Kegawat Daruratan

<b>Pemeriksaan</b>	<b>Jumlah Kunjungan</b>
Pelayanan Tindakan	778

2. Kualitas mutu layanan Puskesmas Lumpue mengacu pada SPM, berikut target Standar Minimal Puskesmas Lumpue tahun 2021 berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2018-2023 :

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan Dasar</b>	<b>Indikator</b>	<b>Standar</b>	<b>Pencapaian Jan-Nov 2021</b>		<b>Rencana Pencapaian</b>	
				<b>N</b>	<b>%</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
						<b>%</b>	<b>%</b>
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	422	64,59%	100%	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	589	72,93%	100%	100%

3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	324	77,89%	100%	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standard	100%	427	57,79%	100%	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat kan skrining kesehatan sesuai standar	100%	395	23.20%	100%	100%

6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	735	61,28%	100%	100%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	1566	98,92%	100%	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	347	79,55%	100%	100%

9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	242	78,45%	100%	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	39	84,78%	100%	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	Persentase Orang dgn TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	333	94,87%	100%	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	4	100%	100%	100%

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

##### A. Identifikasi Masalah Kesehatan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan adalah :

###### 1. Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate (IMR)* Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya ibu hamil/ibu bersalin yang meninggal pada setiap 100.000 Kelahiran Hidup. Angka ini digunakan untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan serta tingkat pelayanan kesehatan terutama pada ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas. Pada tahun 2021, terdapat 0 (nol) kasus kematian ibu. Target SDGs yakni 70 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga kematian ibu masih menjadi masalah kesehatan.

###### 2. Penyakit TB

Tahun 2021, jumlah pasien TB yang sembuh adalah 45 pasien dari 41 pasien TB yang diobati sehingga angka kesembuhan adalah 95%,

###### 3. Kanker Payudara dan Serviks

Jumlah perempuan usia 30 – 50 tahun yang melakukan pemeriksaan leher rahim dan payudara pada tahun 2021 sebanyak 30 orang (0,08 %) dengan tidak ada kasus IVA positif dan kasus tumor/benjolan. Masih rendahnya cakupan deteksi dini kanker payudara dan serviks karena target pemerintah pusat minimal 80% perempuan usia 30-50 tahun melakukan deteksi dini serta adanya peningkatan jumlah kasus IVA positif dan kasus adanya tumor/benjolan sehingga kanker payudara dan serviks masih menjadi masalah kesehatan.

###### 4. Pemberian ASI Eksklusif

Tahun 2021 jumlah bayi yang diberi ASI Eksklusif sebanyak 240 bayi dari total bayi sebanyak 419 bayi sehingga cakupan pemberian ASI Eksklusif pada tahun 2021 sebesar 57 %

###### 5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Di tahun 2021 cakupan rumah tangga yang ber PHBS mencapai <40%, Hal ini disebabkan karena masih banyak rumah tangga yang belum memenuhi indikator PHBS seperti bayi diberi ASI eksklusif, melakukan aktifitas fisik dan tidak merokok, rendahnya rumah tangga yang ber PHBS masih menjadi masalah kesehatan.

B. Penentuan.....

## **B. Penentuan Isu Strategis**

Isu strategis adalah permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode RPJMD sebelumnya dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan dalam jangka panjang, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Dari hasil analisis kinerja pelayanan 5 (lima) tahun yang lalu serta telaahan visi dan misi Kepala daerah, Renstra Kementerian Kesehatan RI, Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan, RTRW dan kajian KLHS dapat diidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Parepare, yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Dinas Kesehatan. Isu-isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan di Kota Parepare adalah sebagai berikut :

- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terutama calon ibu dan keluarga terkait hal-hal yang perlu dilakukan dan dihindari dalam mempersiapkan kelahiran.
- Masih kurangnya jumlah posyandu
- Kurangnya SDM / Kader untuk melakukan pelacakan, penderita melakukan pemeriksaan/pengobatan diluar dr Faskes yang menggunakan program DOTS.
- Masih tingginya Komplikasi penyakit TB dengan penyakit lain seperti DM, HIV.
- Masih tingginya Masalah Gizi (Stunting)
- Masih rendahnya tingkat kepatuhan minum obat penderita (perlu peran aktif dari keluarga/PMO).
- Rendahnya Mobilisasi ibu hamil, terkadang ibu hamil menjalani persalinan diluar kota atau ibu hamil yang berdomisili diluar kota melakukan persalinan di Kota Parepare.
- Masih rendahnya kesadaran orang tua untuk membawa balitanya ke Posyandu setelah selesai periode imunisasi dasar

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **A. Visi dan Misi**

**Visi :**

Menjadi Sarana Pelayanan Kesehatan Terbaik Untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Lumpue

**Misi :**

1. Memberikan Pelayanan Bermutu dan Profesional
2. Menggiatkan Promosi dan Preventif
3. Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Sejalan Dengan Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan

#### **B. Tujuan dan sasaran**

Tujuan dan sasaran BLUD Puskesmas Lumpue mengikuti tujuan dan sasaran dinaskesehatan. Hal ini ditujukan agar terdapat kesinambungan perencanaan BLUD Puskesmas dan dinas kesehatan sesuai dengan amanat permendagri no 79 tahun 2019. Berikut penjelasan tujuan dan sasaran BLUD Puskesmas Lumpue yang mengacu pada tujuan dan sasaran dinas kesehatan:

##### **1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BLUD Puskesmas Lumpue**

Mengacu pada rencana strategis Dinas kesehatan, maka tujuan yang ditetapkan BLUD Puskesmas Lumpue adalah meningkatnya derajat kesehatan. Atas tujuan tersebut, maka sasaran yang ditetapkan BLUD Puskesmas Lumpue adalah meningkatnya keluarga sehat. Mengingat tujuan dan sasaran BLUD Puskesmas Lumpue sudah ditentukan oleh Dinas kesehatan, maka BLUD Puskesmas Lumpue perlu merumuskan sasaran dan indikator sasaran BLUD Puskesmas Lumpue beserta target kinerjanya, berikut penjabarannya:

**Tabel 1**

**Sasaran dan Indikator Sasaran BLUD Puskesmas tahun 2022 s.d. 2023  
dari tujuan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**

Sasaran BLUD Puskesmas	: Meningkatkan Keluarga Sehat
Nomenklatur Program Kesehatan Tk I	: Program Peningkatan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tk I
Nomenklatur Kegiatan Lumpue	: Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Lumpue

**INDIKATOR SASARAN BLUD PUSKESMAS**

No	Indikator	Target Kinerja		Penanggung jawab
		2022	2023	
<b>1.</b>	<b>Pelayanan Loker</b>			
1.1	Waktu tunggu pelayanan pendaftaran	≤ 8	≤ 8	Pemeriksaan Umum
1.2	Visite Rate (% jumlah penduduk)	25	25	Pemeriksaan Umum
<b>2.</b>	<b>Pengobatan Umum</b>			
1.1	Dokter pemberi pelayanan di poli umum	100	100	Pemeriksaan Umum
1.2	Contact Rate	25	25	Pemeriksaan Umum
1.3	Jam buka pelayanan pengobatan umum sesuai ketentuan : 1. Senin-Kamis: jam 07.30-12.00 2. Jumat: jam 07.30-11.00 3. Sabtu : jam 07.30-11.30	100	100	Pemeriksaan Umum
1.4	Waktu tunggu pelayanan pengobatan umum	≤15	≤15	Pemeriksaan Umum
1.5	Persentase rujukan non spesialisistik	< 5	< 5	Pemeriksaan Umum
<b>3.</b>	<b>Pengobatan Gigi</b>			
3.1	Dokter pemberi pengobatan gigi dan mulut	100	100	Kesehatan Gigi dan Mulut
3.2	Rasio gigi tetap yang ditambah terhadap gigi yang dicabut	3:1	3:1	Kesehatan Gigi dan Mulut
3.3	Contact Rate	15	15	Kesehatan Gigi dan Mulut
3.4	Jam buka pelayanan pengobatan gigi sesuai ketentuan : 1. Senin-Kamis: jam 07.30-12.00 2. Jumat: jam 07.30-11.00 3. Sabtu : jam 07.30-11.30	100	100	Kesehatan Gigi dan Mulut

No	Indikator	Target Kinerja		Penanggung jawab
		2022	2023	
3.5	Waktu tunggu pelayanan pengobatan Gigi	≤30	≤30	Kesehatan Gigi dan Mulut
<b>4.</b>	<b>Gawat Darurat</b>			
4.1	Kemampuan menangani life saving	100	100	Gawat Darurat
4.2	Pasien yang tertangani di UGD	100	100	Gawat Darurat
4.3	Waktu tanggap pelayanan di Gawat Darurat (Respon Time)	≤ 5	≤ 5	Gawat Darurat
4.4	Pemberi pelayanan kegawat daruratan bersertifikat Advanced Trauma Life Support/Basic Trauma Life Support/Advanced Cardiac Life Support/ Penanggulangan Penderita Gawat Darurat yang masih berlaku	100	100	Gawat Darurat
4.5	Kepuasan pelanggan	90	90	Gawat Darurat
4.6	Kematian pasien ≤ 24 jam	≤ 2	≤ 2	Gawat Darurat
<b>5.</b>	<b>Pelayanan KIA/KB</b>			
5.1	Pemberi Pelayanan Ibu dan Anak minimal berpendidikan D3 kebidanan	100	100	KIA-KB Perawatan
5.2	Jam buka pelayanan KIA sesuai ketentuan 1. Senin-Kamis: jam 07.30-12.00 2. Jumat: jam 07.30-11.00 3. Sabtu : jam 07.30-11.30	100	100	KIA-KB Perawatan
5.3	Waktu tunggu pelayanan KIA	≤ 20	≤ 20	KIA-KB Perawatan

No	Indikator	Target Kinerja		Penanggung jawab
		2022	2023	
<b>6.</b>	<b>Pelayanan Imunisasi</b>			
6.1	Pemberi Pelayanan Imunisasi minimal tenaga keperawatan (Perawat atau Bidan) berpendidikan D3 kebidanan dan/atau D3 Keperawatan)	100	100	KIA-KB Perawatan
6.2	Jam buka pelayanan Imunisasi sesuai ketentuan: bersamaan dengan jadwal Posyandu Senin jam 07.30-12.00	100	100	KIA-KB Perawatan
<b>7.</b>	<b>Rawat Inap</b>			
7.1	Pemberi pelayanan di rawat inap: Dokter umum dan Perawat atau Bidan minimal pendidikan D3	100	100	Rawat Inap
7.2	Dokter penanggungjawab pasien rawat inap	100	100	Rawat Inap
7.3	Ketersediaan pelayanan rawat inap dan kebidanan	100	100	Rawat Inap
7.4	Jam visite Dokter Umum: 07.30-13.30 setiap hari kerja	100	100	Rawat Inap
7.5	BOR	80	80	Rawat Inap
7.6	ALOS	5	5	Rawat Inap
7.7	Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	0	0	Rawat Inap
7.8	Kematian pasien > 48 Jam	≤0,2 4	≤0,2 4	Rawat Inap
7.9	Kejadian pulang paksa	≤ 2	≤ 2	Rawat Inap
7.10	Kepuasan pelanggan	90	90	Rawat Inap
<b>8.</b>	<b>Persalinan</b>			
8.1	Kejadian kematian ibu karena persalinan			
	a. Perdarahan	≤ 1	≤ 1	Persalinan

b. Eklamsia.....

No	Indikator	Target Kinerja		Penanggung jawab
		2022	2023	
	b. Eklamsia	≤ 1	≤ 1	Persalinan
	c. Sepsis	≤0,2	≤0,2	Persalinan
8.2	Pemberi pelayanan persalinan normal oleh: Dokter Umum terlatih (Asuhan persalinan); Bidan terlatih (Asuhan persalinan)	100	100	Persalinan
8.3	Pemberi persalinan dengan penyulit oleh Tim yang terlatih Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED)	100	100	Persalinan
8.4	Kemampuan menangani Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 1500 gr - 2500 gr	100	100	Persalinan
8.5	Konseling dan Layanan KB oleh Bidan terlatih	100	100	Persalinan
8.6	Kepuasan pelanggan	90	90	Persalinan
<b>9.</b>	<b>Laboratorium</b>			
9.1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium: untuk kimia darah dan darah rutin	≤ 90	≤ 90	Laboratorium
9.2	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium	100	100	Laboratorium
9.3	Angka kesalahan pembacaan slide (error rate)	≤ 5	≤ 5	Laboratorium
9.4	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100	100	Laboratorium
9.5	Kepuasan pelanggan	90	90	Laboratorium
<b>10.</b>	<b>Kefarmasian</b>			
10.1	Waktu pelaksanaan pelayanan:			Kefarmasian
	a. obat jadi	≤ 10	≤ 10	Kefarmasian

b. obat.....

No	Indikator	Target Kinerja		Penanggung jawab
		2022	2023	
	b. obat tracikan	≤ 15	≤ 15	Kefarmasian
10.2	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100	100	Kefarmasian
10.3	Penulisan resep sesuai formularium	100	100	Kefarmasian
10.4	Ketersediaan obat sesuai dengan diagnose penyakit sesuai kewenangan BLUD Puskesmas	100	100	Kefarmasian
10.5	Kepuasan pelanggan	90	90	Kefarmasian
<b>11.</b>	<b>Pelayanan Gizi</b>			
11.1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien rawat inap : Pagi : 06.00 – 07.00 Siang : 11.00 – 12.00 Malam : 17.00– 18.00	80	80	Gizi Perawatan
11.2	Ketersediaan konseling gizi bagi pasien oleh tenaga gizi	100	100	Gizi Perawatan
11.3	Kesesuaian pemberian diet pasien rawat inap	100	100	Gizi Perawatan
<b>12.</b>	<b>Aspek Rekam Medis</b>			
12.1	Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan	100	100	Pemeriksaan Umum
12.2	Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100	100	Pemeriksaan Umum
12.3	Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat jalan	≤ 10	≤ 10	Pemeriksaan Umum

12.4 Waktu.....

12.4	Waktu penyediaan dokumen	≤ 10	≤ 10	Pemeriksaan
------	--------------------------	------	------	-------------

No	Indikator	Target Kinerja		Penanggung jawab
		2022	2023	
	rekam medis pelayanan rawat inap			Umum
<b>13.</b>	<b>Pengelolaan Limbah</b>			
13.1	Baku mutu limbah cair :	100	100	Tim Mutu
	1. BOD < 30 mg/l;	100	100	
	2. COD < 80 mg/l;	100	100	
	3. TSS < 30 mg/l;	100	100	
	4. PH 6-9	100	100	
13.2	Pengelolaan limbah padat infeksius dan non infeksius sesuai dengan aturan yang berlaku	100	100	Tim Mutu
<b>14.</b>	<b>Ambulans</b>			
14.1	Waktu pelayanan ambulans BLUD Puskesmas Rawat Inap: 24 jam	100	100	Gawat Darurat
14.2	Response time pelayanan ambulans oleh masyarakat yang membutuhkan	≤ 20	≤ 20	Gawat Darurat
<b>15.</b>	<b>Pelayanan Laundry</b>			
15.1	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100	100	Rawat Inap
<b>16.</b>				
16.1	Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) di setiap Instalasi	100	100	Urusan Rumah Tangga
<b>17.</b>	<b>Pemeliharaan Alat</b>			
17.1	Response Time menanggapi kerusakan alat (dlm waktu 15 menit)	100	100	Urusan Rumah Tangga
				17.2 Ketepatan.....
17.2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100	100	Urusan Rumah Tangga

No	Indikator	Target Kinerja		Penanggung jawab
		2022	2023	
17.3	Peralatan laboratorium dan alat tukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100	100	Laboratorium
<b>18.</b>	<b>Administrasi dan Manajemen</b>			
18.1	Mini lokakarya BLUD Puskesmas bulanan	100	100	KA-Subbag TU
18.2	Mini lokakarya lintas sektor 3 bulanan	100	100	KA-Subbag TU
18.3	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100	100	Urusan SIP
18.4	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100	100	Urusan Kepegawaian
18.5	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan gaji berkala	100	100	Urusan Kepegawaian
18.6	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku	100	100	Urusan Keuangan
18.7	Waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2	≤ 2	Urusan SIP
18.8	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki surat ijin praktik di BLUD Puskesmas	100	100	Urusan Kepegawaian
18.9	Pemimpin BLUD dan Pejabat Keuangan memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa	100	100	Urusan Kepegawaian
18.10	Pengelola keuangan memiliki sertifikat pengelolaan keuangan daerah	100	100	Urusan Kepegawaian

No	Indikator	Target Kinerja		Penanggung jawab
		2022	2023	
<b>19.</b>	<b>Sistem Informasi BLUD Puskesmas</b>			
19.1	Ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100 %	100 %	Subbag TU (Sistem Informasi)
19.2	Ketepatan waktu penyusunan laporan capaian SPM dan PKP	100 %	100 %	Subbag TU (Sistem Informasi)
<b>20.</b>	<b>Urusan Kepegawaian</b>			
20.1	Menyelenggarakan Administrasi kepegawaian	100 %	100 %	Subbag TU (Kepegawaian)
20.2	Jumlah Pegawai PNS	35	37	Subbag TU (Kepegawaian)
20.3	Jumlah Pegawai Non-PNS	33	31	Subbag TU (Kepegawaian)
20.4	Terlaksananya kegiatan Pendidikan Pelatihan dan team building	100 %	100 %	Subbag TU (Kepegawaian)
<b>21.</b>	<b>Urusan Kepegawaian</b>			
21.1	Tersedianya sarana penunjang pelayanan di BLUD Puskesmas sesuai standar	100 %	100 %	Subbag TU (Rumah Tangga)
21.2	Presentase pemenuhan kebutuhan utilitas rutin BLUD Puskesmas	100 %	100 %	Subbag TU (Rumah Tangga)
21.3	Presentase pemenuhan kebutuhan kantor BLUD Puskesmas	100 %	100 %	Subbag TU (Rumah Tangga)
21.4	Presentase pelaksanaan kegiatan manajemen BLUD Puskesmas	100 %	100 %	Subbag TU (Rumah Tangga)
<b>22.</b>	<b>Urusan Keuangan</b>			
22.1	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan sesuai PSAP	100 %	100 %	Subbag TU (Keuangan)

No	Indikator	Target Kinerja		Penanggung jawab
		2022	2023	
22.2 Presentase.....				
22.2	Presentase penyerapan anggaran lebih dari 80%	100 %	100 %	Subbag TU (Keuangan)
22.3	Ketepatan waktu pengu-rusan berkas gaji PNS	100 %	100 %	Subbag TU (Keuangan)
22.4	Ketepatan waktu pembayaran gaji pegawai Non-PNS	100 %	100 %	Subbag TU (Keuangan)
22.5	Ketepatan waktu pembayaran jaspel karyawan	100 %	100 %	Subbag TU (Keuangan)
<b>23.</b>	<b>Manajemen Mutu</b>			
23.1	Indek Kepuasan Masyarakat	>80 %	>80 %	Manajemen Mutu
23.2	BLUD Puskesmas terakreditasi secara berkala	Uta ma	Pari- purn a	Manajemen Mutu
<b>24.</b>	<b>Jaringan dan Jejaring</b>			
24.1	Penilaian Standar Puskesmas Pembantu Baik (>8,5)	>8,5	>8,5	Puskesmas Pembantu
24.2	Frekuensi pelayanan BLUD Puskesmas keliling setiap desa dalam 1 tahun	12 kali	12 kali	BLUD Puskesmas Keliling
24.3	Pelayanan bidan desa memenuhi standar pelayanan kebidanan	100 %	100 %	Bidan Desa
24.4	Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan memenuhi standar	100 %	100 %	Jejaring Fasyankes
24.5	Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan mengirimkan laporan pelayanan sesuai jadwal	100 %	100 %	Jejaring Fasyankes
<b>25.</b>	<b>UKP Tambahan</b>			
25.1	Pemeriksaan Lansia	100 %	100 %	Kesehatan Lansia
25.2	Pemeriksaan Jiwa	100 %	100 %	Jiwa

No	Indikator	Target Kinerja		Penanggung jawab
		2022	2023	

## 25.3 Pemeriksaan.....

25.3	Pemeriksaan Remaja	100 %	100 %	Kesehatan Reproduksi Remaja
25.4	Pemeriksaan MTBS	50%	50%	KIA-KB Perawatan
25.5	Pemeriksaan TB	100 %	100 %	P2 TB
25.6	Pemeriksaan VCT HIV	100 %	100 %	P2 HIV
25.7	Pelayanan Pengaduan Masyarakat	100 %	100 %	Tim Pengaduan Pelanggan
25.8	P3K	100 %	100 %	UGD

**BAB V****PROGRAM DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2022-2023**

## A. Program

1. Program Upaya kesehatan ibu dan anak serta KB
  - a. Cakupan kunjungan ibu hamil K-1
  - b. Cakupan kunjungan ibu hamil K-4
  - c. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
  - d. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan
  - e. Cakupan neonatus yang ditangani
  - f. Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan
  - g. Cakupan kunjungan neonatus lengkap
  - h. Cakupan kunjungan bayi
  - i. Cakupan bayi yang sudah di SDIDKT
  - j. Cakupan KB Aktif
  - k. Cakupan KB pasca bersalin
2. Program Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat.
  - a. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
  - b. Cakupan pemberian MP-ASI pada anak 6-24 bulan dari gakin
  - c. Cakupan balita ditimbang berat badannya (D/S)
  - d. Cakupan balita yang naik berat badannya (N/D)
  - e. Cakupan pemantauan pertumbuhan balita BGM
  - f. Cakupan pemberian asi eksklusif 0-6 bulan
  - g. Cakupan bayi balita (6-59 bulan) mendapat kapsul vitamin A dosis tinggi
  - h. Cakupan ibu nifas mendapatkan kapsul vitamin A
  - i. Cakupan pemberian Fe 90 tablet pada ibu hamil
3. Program Upaya pencegahan penyakit
  - a. Cakupan desa/kelurahan UCI
  - b. Cakupan Bias Campak kelas 1SD
4. Program Upaya Pemberantasan Penyakit
  - a. Cakupan desa/kelurahan yang mengalami KLB yang dilaksanakan PE <24jam
  - b. Cakupan penemuan dan penanganan AFP rate per 100.000 penduduk <15th.
  - c. Angka penemuan pasien baru TB BTA (+) (CDR)
  - d. Cakupan diare ditemukan dan ditangani

e. Cakupan.....

- e. Cakupan pneumonia balita ditemukan dan ditangani
  - f. Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD
  - g. Angka KIPI yang ditangani
5. Program Upaya penyehatan lingkungan
    - a. Cakupan rumah/bangunan bebas jentik nyamuk
    - b. Cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan
    - c. Cakupan rumah tangga pengguna air bersih
    - d. Cakupan rumah tangga yang menggunakan jamban sehat
    - e. Cakupan rumah yang mempunyai SPAL
    - f. Cakupan penyakit berbasis lingkungan yang dilayani di klinik sanitasi
    - g. Cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan
    - h. Prosentase air minum yang memenuhi syarat
    - i. Prosentase penduduk yang memiliki akses air minum
    - j. Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan.
  6. Program Upaya Promosi kesehatan
    - a. Cakupan rumah tangga PHBS
    - b. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
    - c. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
    - d. Cakupan desa siaga aktif
  7. Program upaya pengobatan rawat jalan
    - a. Cakupan kunjungan rawat jalan
    - b. Survey kepuasan pelanggan
    - c. Tanggapan terhadap keluhan
    - d. Pelayanan konseling pojok gizi, laktasi dan oralit.
  8. Program Upaya kesehatan sekolah
    - a. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat
    - b. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SMP dan setingkat
    - c. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SMA dan setingkat
    - d. Cakupan sekolah sehat
  9. Program perawatan kesehatan Masyarakat
    - a. Persentase kelompok keluarga rawan yang di perkesmas.
    - b. Persentase Ibu hamil yang risiko tinggi yang di perkesmas.
    - c. Persentase balita risiko tinggi yang di perkesmas.
    - d. Persentase pasien penyakit menular kronis (TBC BTA +, HIV+/AIDS) yang di perkesmas.

10. Program kesehatan gigi dan mulut
  - a. Cakupan penduduk dapat pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
  - b. Cakupan ibu hamil dapat pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
  - c. Ratio penambalan dan pencabutan.
11. Program kesehatan mata
  - a. Cakupan Skrining penderita katarak.
  - b. Cakupan Penemuan penderita mata katarak.
  - c. Cakupan Penderita katarak di operasi.
  - d. Cakupan Perawatan Pasca operasi
12. Program kesehatan usia lanjut
13. Program perbaikan sarana dan prasarana
14. Program sistem informasi kesehat

## B. KONDISI DAN RENCANA MANAJEMEN PUSKESMAS TAHUN 2021

### 1. KONDISI TENAGA TEKNIS KESEHATAN

Tabel 5.3 . Kondisi Tenaga kesehatan UPTD Puskesmas Lumpue tahun 2021

<b>NO</b>	<b>Jenis SDM</b>	<b>Jumlah</b>
1	Dokter Umum	4
2	Dokter Gigi	2
3	Apoteker (S1)	3
4	Perawat (D.3)	8
5	Perawat gigi (D.3)	2
6	Perawat (D.4)	16
7	Bidan (D.3)	10
8	SKM AdminKes	4
9	SKM Sanitarian	1
10	Asisten Apoteker (D.3)	4
11	SKM Gizi /Nutrisionis	1
11	Gizi / Nutrisionis	2
12	Analisis Kesehatan	2
13	SKM Epidemiologi	2
14	SKM Promkes	2
15	Bidan (D.4)	8
<b>Jumlah</b>		<b>71</b>

## 2. PROYEKSI KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN

Untuk melaksanakan strategi dan mencapai target kinerja pelayanan, kebutuhan pengembangan SDM diproyeksikan sebagai berikut.

Tabel 5.4. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kesehatan Tambahan tahun 2022 - 2023

<b>NO</b>	<b>Jenis SDM</b>	<b>Jumlah</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Dokter Umum	4	1	1
2	Dokter Gigi	2	1	1
3	Apoteker (S1)	3	2	2
4	Perawat (D.4)	16	2	2
5	SKM Gizi /Nutrisionis	1	1	1
6	Gizi / Nutrisionis	2	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

Tabel 5.5. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Non Kesehatan Tambahan tahun 2022-2023

<b>NO</b>	<b>Jenis SDM</b>	<b>Jumlah</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Pendaftaran	3	2	2
2	Sopir	1	1	1
3	Petugas Simpus	0	1	1
4	Staff Administrasi	1	1	1
5	Staff Akuntan	0	2	2
<b>Jumlah</b>			<b>7</b>	<b>7</b>

### C. PENDANAAN INDIKATIF

Menjadikan Puskesmas yang bermutu dan sehingga mampu menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau, mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan dengan meningkatkan SDM yang handal dan profesional.

1. Indikator penilaian dan target kinerja Puskesmas tahun 2022 – 2023 yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.1. Standar Pelayanan Minimal**

<b>MENINGKATNYA CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR BAGI MASYARAKAT</b>		
<b>INDIKATOR HASIL</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	95%	100%
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.	90%	100%
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95%	100%
Cakupan pelayanan nifas	95%	100%
Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani	90%	100%
Cakupan kunjungan bayi	95%	100%
Cakupan Desa/Kelurahan Universal : United Child Immunization (UCI)	95%	100%
Cakupan pelayanan anak balita	95%	100%
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin.	90%	100%
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	95%	100%
Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	90%	100%
Cakupan peserta KB aktif	95%	100%

## 2. Kinerja Kegiatan Puskesmas

Jumlah Kunjungan di Puskesmas Lumpue tahun 2021 sebanyak 18.722 kunjungan, kunjungan pasien umum di puskesmas sebanyak 8.913 hal ini berarti 47.6% adalah pasien umum. Adapun proyeksi jumlah kunjungan pasien umum yang mendapat tindakan di puskesmas lumpue setiap tahunnya meningkat sebanyak 20%. Proyeksi Jumlah Kunjungan Pasien Umum selama 2 tahun ke depan.

Tabel 5.2. Target Kinerja Pelayanan untuk Proyeksi Jumlah Pasien Umum

<b>PELAYANAN PUSKESMAS</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>TINDAKAN GIGI</b>		
Pencabutan Gigi	505	600
Penambalan Gigi	40	80
Pengobatan Gigi dan jaringan mulut	10	40
Perawatan lainnya	707	850
<b>TINDAKAN KIA/KB</b>		
ANC (Antenatal Care) dan PNC (Post Natal Care)	891	1158
Imunisasi	130	200
KB	315	425
<b>LABORATORIUM</b>		
<i>Pemeriksaan darah</i>		
Hematologi	765	1000
Kimia Darah	2023	2629
Parasitologi	430	600
Imunologi	83	150
Bakteriologi	1500	2000
<b>RAWAT DARURAT</b>		
Tindakan Medis	440	600

### 3. Tarif Pasien Umum

Saat ini tarif yang berlaku di Puskesmas Lumpue adalah untuk pasien umum/Tidak memiliki Jaminan Kesehatan. Untuk menghitung proyeksi pendapatan pelayanan selama lima tahun ke depan, dipakai tarif rata-rata yang berlaku saat ini yaitu Perda Kota Parepare No.2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pada paparan selanjutnya disampaikan mengenai dasar tarif pasien Umum untuk setiap produk dan pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Tarif yang digunakan disini berdasarkan tarif yang berlaku terakhir di Puskesmas Lumpue.

Tabel 5.3  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN  
KESEHATAN

#### I. Tarif Tindakan Rawat Jalan dan IG

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
a.	Hecting :	
	1. Hecting (1-3 jahitan)	Rp. 7.500
	2. Hecting (4-6 jahitan )	Rp. 3.000
	3. Hecting (7-9 jahitan)	Rp. 3.000
	4. Hecting (10-12 jahitan)	Rp. 3.000
	5. Hecting (13-15 jahitan)	Rp. 3.000
	6. Hecting (16-18 jahitan)	Rp. 3.000
	7. Hecting (19-21 jahitan)	Rp. 3.000
b.	Aff Hecting	Rp. 1000
c.	Pasang Infus :	
	1. Pasang Infus Anak	Rp. 5.000
	2. Pasang Infus Dewasa	Rp. 5.000
d.	Injeksi Paket /hari:	Rp. 10.000
e.	Perawatan Gigi :	
	1) Pencabutan gigi sulung	Rp. 15.000
	2) Pencabutan gigi permanen	Rp. 15.000
	3) Ekstraksi Biasa	Rp. 30.000
	4) Ekstraksi Komplikasi	Rp. 60.000
	5) Tambalan Glasionomer Kavitas Sedang	Rp. 40.000
	6) Tambalan Glasionomer Kavitas Besar	Rp. 65.000
	7) Aleveolektomi per regio	Rp. 45.000

	8) Hecting	Rp. 10.000
	9) Light Curring Kavitas Sedang	Rp. 102.500
	10) Light Curring Kavitas Besar	Rp. 135.500
	11) Odondectomy Kasus Berat	Rp. 220.000
	12) Odondectomy Kasus Sedang	Rp. 150.000
	13) Scaling Kasus Berat	Rp. 120.000
	14) Scaling Kasus Sedang	Rp. 80.500
	15) Curet, insisi, Operculektomy	Rp. 58.00
f.	Membersihkan Telinga	Rp. 10.000
g.	Rawat Luka	Rp. 12.000
h.	Tindakan Luka Bakar 1% s/d 10 %	Rp. 5.000
i.	Tindakan Luka Bakar 11% s/d 20%	Rp. 5.000
j.	Tindakan Luka Bakar 21% s/d 30%	Rp. 7.500
k.	Tindakan Luka Bakar 31% s/d 40%	Rp. 7.500

## II. Rawat Inap Tingkat Pertama

No	Rawat Inap Tingkat Pertama	Tarif (Rp)
a	diluar obat (obat disiapkan oleh gudang farmasi Dinas Kesehatan) dan makan.	Rp. 20.000

## III. Tindakan Penyulit Di Luar Persalinan

No	Penyulit diluar Persaliran	Tarif (Rp)
a	Tindakan Persaliran Normal	Rp. 350.000

## IV. Penunjang Diagnostik

No.	Jenis Penunjang Diagnostik	Tarif (Rp)
a	Pemeriksaan Darah ( <i>Hematologi</i> ) :	
	1. Darah Rutin Manual	Rp. 43.000
	2. Darah Rutin Otomatis	Rp. 44.000
	3. Leukosit	Rp. 6.000
	4. Erytrosit	Rp. 6.000
	5. Trombosit	Rp. 6.000
	6. Hematrocyt	Rp. 6.000
	7. Hb Sahli	Rp. 5.000
	8. Golongan Darah	Rp. 6.000
	9. Widal Test	Rp. 17.000
b	Urine :	
	1. Urin Lengkap	Rp. 14.250
	2. Urin Lengkap Perjenis	Rp. 8.000
	3. Tes Kehamilan	Rp. 15.000
c	Feses	Rp. 15.000
d	Kimia Darah :	
	1. Glukose	Rp. 17.000
	2. Kolesterol	Rp. 35.500
	3. Asam urat	Rp. 9.000

## V. Kontrasepsi

NO	Jenis Kontrasepsi	Tarif (Rp)
	a. KB suntik Depo (3 bulan)	Rp20.000
	b. KB suntik Triklofem (3 bulan) / Cyclofem (1 bulan)	Rp20.000
	c. Pasang IUD Cooper-T	Rp120.000
	d. Buka IUD	Rp120.000
	e. Kontrol IUD	Rp5.000

## 4. Proyeksi Pasien Umum

Pada penghitungan proyeksi pendapatan pasien umum di Puskesmas Lumpue digunakan asumsi-asumsi keuangan. Asumsi keuangan ini digunakan karena unsur ketidakpastian masa yang akan datang dan atau akibat dari tidak tersedianya data yang ada pada Puskesmas. Asumsi keuangan yang digunakan pada pembuatan Rencana Strategis Bisnis (RSB) Puskesmas Lumpue adalah sebagai berikut :

- Tarif untuk pasien umum didasarkan pada Perda Kota Parepare No. 2 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan Kesehatan
- Untuk pelayanan yang belum ada tarifnya.

Dari tabel berikut, untuk proyeksi pendapatan dari pasien umum mengalami kenaikan pendapatan rata-rata sebesar 20 % untuk tiap tahunnya.

Tabel. 5.4 Proyeksi pendapatan dari kunjungan pasien umum di puskesmas Lumpue.

<b>PELAYANAN PUSKESMAS</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>TINDAKAN GIGI</b>		
Pencabutan Gigi	Rp7.575.000	Rp9.000.000
Penambalan Gigi	Rp1.600.000	Rp3.200.000
Pengobatan Gigi dan jaringan mulut	Rp200.000	Rp800.000
Perawatan lainnya	Rp17.675.000	Rp21.250.000

Tindakan.....

<b>TINDAKAN KIA/KB</b>		
ANC (Antenatal Care) dan PNC	Rp534.600.000	Rp694.800.000
Imunisasi	Rp 1. 300.000	Rp2.000.000
KB	Rp 6. 300.000	Rp8.500.000
<b>LABORATORIUM</b>		
Hematologi	Rp45.900.000	Rp60.000.000
Kimia Darah	Rp71.816.500	Rp 93. 329.500
Parasitologi	Rp6.235.000	Rp8.700.000
Imunologi	Rp3.569.000	Rp6.450.000
Bakteriologi	Rp25.500.000	Rp34.000.000
<b>RAWAT DARURAT</b>		
Tindakan Medis	Rp14.300.000	Rp19.500.000
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>Rp736.570.500</b>	<b>Rp961.529.500</b>

## D. Program Puskesmas Lumpue Tahun 2022-2023

## 1. Indikator kerja Standar Pelayanan Minimal UPTD puskesmas Lumpue

TABEL 5.1. INDIKATOR KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL UPTD PUSKESMAS LUMPUE

TUJUAN					SASARAN			CARA MENCAPAI TUJUAN	KET
NO	URAIAN	NO	URAIAN	NO	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Berkelanjutan yang Berorientasi Pada Pelanggan	1	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat	1	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat	Cakupan Kunjangan Ibu Hamil K1	Program Puskesmas Dilaksanakan di dalam dan diluar gedung dan meningkatkan kunjungan rumah	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta KB	
				2		Cakupan Kunjangan Ibu Hamil K4			
				3		Cakupan komplikasi Kebidanan yang Ditangani			
				4		Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi			
				5		Cakupan Pelayanan Nifas			

6. Cakupan.....

				6	Cakupan Neontatus dengan Komplikasi yang Ditangani			
				7	Cakupan Kunjungan Bayi			
				8	Cakupan Pelayanan Anak Balita			
				9	Cakupan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Balita dan Pra Sekolah			
				10	Cakupan peserta KB aktif			
				1	Cakupan Imunisasi Hb-0 bayi lahir < 7 hari		Program Imunisasi	
				2	Cakupan imunisasi BCG			
				3	Cakupan imunisasi Hb-DPT 3			
				4	Cakupan imunisasi polio 4			
				5	Cakupan imunisasi campak			

				6		Desa/ Kelurahan UCI			
				7		Cakupan BIAS campak			
				8		Cakupan BIAS DT Kelas 1 dan Td Kelas 2			
				1		Cakupan Balita teddaftar dan memiliki buku KIA		Program Gizi Masyarakat	
				2		Cakupan Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S)			
				3		Cakupan Balita yang Naik Berat Badannya (N/D)			
				4		Balita Gizi Kurang yang Tertangani			
				5		Balita Gizi Buruk tertangani			
				6		Cakupan bayi balita (6-59 bulan) mendapat kapsul Vitamin A dosis tinggi			

				7	Cakupan Ibu Nifas mendapat Kapsul Vitamin A			
				8	Cakupan Pemberian Fe 90 tablet Ibu Hamil			
				9	Ibu Hamil yang diukur LILA			
				10	Cakupan Pemberian MP-ASI pada anak 6-24 bulan dari Gakin			
				1	Cakupan desa/ kelurahan yang mengalami KLB ditangani < 24 jam		Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit menular	
				2	Cakupan penemuan dan penanganan AFP rate per100.000 penduduk < 15 tahun			
				3	Angka Penemuan pasien baru TB BTA (+) (CDR)			

				4	Kesembuhan Penderita TBC BTA Positif			
				5	Cakupan diare yang ditangani			
				6	Cakupan pneumonia balita yang ditangani			
				7	Penderita DBD yang ditangani			
				8	Penderita Malaria yang ditangani			
				9	Penderita Kusta yang ditangani			
				10	Kasus Filariasis yang ditangani			
				11	Penderita PMS yang ditangani			
				12	Penderita HIV/AIDS yang ditangani			
				1	Cakupan Rumah/ Bangunan Bebas Jentik		Program Kesehatan Lingkungan	
				2	Cakupan Rumah Sehat			

				3	Cakupan Kepemilikan Jamban Sehat			
				4	Cakupan sarana Air Bersih			
				5	Cakupan TTU yang Memenuhi Syarat Kesehatan			
				6	Cakupan Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman yang Memenuhi Syarat Kesehatan			
				7	Institusi yang dibina			
				1	Cakupan rumah Tangga PHBS		Program Promosi Kesehatan dan Lemitraan Lintas Sektoral	
				2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin			
				3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin			
				4	Cakupan Desa Siaga Aktif			

				5		Penyuluhan NAPZA oleh Petugas Kesehatan			
				6		Posyandu Purnama			
				1		Cakupan Kunjungan Rawat Jalan		Upaya Kesehatan Perorangan	
				1		Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat		UKS	
				2		Cakupan Sekolah Sehat			

## 2. Rencana Pencapaian Indikator Kinerja UPTD Puskesmas Lumpue Tahun 2015- Tahun 2020

TABEL 5.2. RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UPTD PUSKESMAS  
LUMPUE

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Indikator	Standar	Pencapaian Januari- November 2021		Rencana Pencapaian	
						N	%	2022	2023
								%	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sesuai Standar Pelayanan Antenatal	Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	422	64,59%	100%	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Sesuai Standar Pelayanan Persalinan	Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	589	72,93%	100%	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	324	77,89%	100%	100%

4. Pelayanan.....

4	Pelayanan Kesehatan Balita	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Balita	Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standard	100%	427	57,79%	100%	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Sesuai Standar Skrining Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Anak pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat kan skrining kesehatan sesuai standar	100%	395	23.20%	100%	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Sesuai Standar Skrining Kesehatan Usia Produktif	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 Tahun	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	735	61,28%	100%	100%

7. Pelayanan.....

7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Sesuai Standar Skrining Kesehatan Usia Lanjut	Warga Negara Indonesia usia 60 Tahun keatas	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	1566	98,92%	100%	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	347	79,55%	100%	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus	Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	242	78,45%	100%	100%

10. Pelayanan.....

10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Jiwa	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	39	84,78%	100%	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan TB	Orang dengan TB	Persentase Orang dgn TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	333	94,87%	100%	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Sesuai Standar Mendapatkan Pemeriksaan HIV	Orang beresiko terinfeksi HIV (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, Waria/ Transgender, Pengguna Napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	4	100%	100%	100%

## 3. Rencana pencapaian standar pelayanan mutu pengembangan

TABEL 5.3. RENCANA CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MUTU PENGEMBANGAN UPTD PUSKESMAS LUMPUE

No.	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Pencapaian 2021	Rencana Pencapaian	
		Jenis	Uraian			2022	2023
1	Pelayanan Gawat Darurat	Input	Kemampuan menangani <i>life saving</i>	100%	100%	100%	100%
			Pemberi pelayanan kegawat-daruratan bersertifikat (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS) yang masih berlaku	100%	100%	100%	100%
		Proses	Jam buka pelayanan gawat darurat	24 Jam	24 jam	24 jam	24 jam
			Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit setelah pasien datang	≤ 5 menit	≤ 5 menit	≤ 5 menit
			Tidak adanya keharusan membayar uang muka	100%	100%	100%	100%
		Outcome	Kepuasan pasien	≥ 70 %	70%	80%	80%

2. Pelayanan.....

2	Pelayanan Rawat Jalan (poliklinik)	Input	Pemberi Pelayanan di Poliklinik	100 % dokter	100%	100%	100%
			Pemberi pelayanan di KIA	100 % bidan terlatih	100%	100%	100%
		Proses	Jam buka pelayanan sesuai dengan ketentuan	08.00 s/d 13.00	Sesuai	sesuai	sesuai
				Setiap hari kerja Jum'at : 08.00 – 11.00			
			Kepatuhan <i>hand hygiene</i>	100%	100%	100%	100%
			Waktu tunggu rawat jalan	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit
		Output	Peresepan obat sesuai formularium Nasional	100%	100%	100%	100%
		Outcome	Kepuasan pasien	≥ 90 %	85%	≥ 90 %	≥ 90 %

3. Pelayanan.....

3	Pelayanan Laboratorium Sederhana	Input	Fasilitan dan peralatan	Sesuai standar Puskesmas		sesuai	sesuai
		Proses	1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 120 menit	120 menit	≤ 120 menit	≤ 120menit
			2. Tidak adanya kejadian tertukar <i>specimen</i>	100%	100%	100%	100%
		Output	1. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%	100%	100%
			2. Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal	100%	100%	100%	100%
		Outcome	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	80%	≥ 80 %	≥ 80 %
4	Pelayanan Farmasi/obat	Input	Pemberi pelayanan farmasi	Sesuai standar Puskesmas	Sesuai	sesuai	sesuai
			Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi	Sesuai standar	Belum sesuai	sesuai	sesuai
			Ketersediaan formularium	Tersedia dan update paling lama 3 thn	tersedia	tersedia	Tersedia
		Proses	Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤ 30 menit	30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit
			Waktu tunggu pelayanan obat racikan	≤ 60 menit	60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit
		Output	Tidak adanya kejadian salah pemberian obat	100%	100%	100%	100%
		Outcome	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	80%	≥ 80 %	≥ 80 %

5. Pelayanan.....

5	Pelayanan gizi	Input	1. Pemberi pelayanan gizi	Tenaga terlatih	Tersedia	tersedia	tersedia
			Ketersediaan pelayanan konsultasi gizi	Tersedia			
		Outcome	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	80%	≥ 80 %	≥ 80 %
6	Pelayanan pasien keluarga miskin	Input	Adanya kebijakan untuk pelayanan keluarga miskin	Ada	Ada	ada	ada
		Proses	1. Waktu tunggu verifikasi kepesertaan pasien keluarga miskin	≤ 15 menit	5 menit	5 menit	5 menit
			2. Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin	100%	100%	100%	100%
		sOutput	Semua pasien keluarga miskin yang dilayani	100%	100%	100%	100%
		Outcome	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	85%	≥ 80 %	≥ 80 %

7	Pelayanan rekam medik	Input	Pemberi pelayanan rekam medis	100% Tenaga terlatih	100%	100%	100%
		Proses	Waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan	$\geq 80\%$	8 menit	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$
			Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	$\geq 80\%$	10 menit	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$
		Output	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	100%	100%	100%
			Kelengkapan <i>Informed Consent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	100%	100%	100%
		Outcome	Kepuasan pelanggan	$\geq 80\%$	80%	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$

8. Pengelolaan.....

8	Pengelolaan limbah	Input	Adanya penanggung jawab pengelola limbah Puskesmas	Ada	Ada	ada	ada
			Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah Puskesmas: padat, cair	Sesuai peraturan perundangan	sesuai	sesuai	sesuai
		Proses	Pengelolaan limbah cair	Sesuai peraturan perundangan	sesuai	sesuai	sesuai
			Pengelolaan limbah padat	Sesuai peraturan perundangan	sesuai	sesuai	sesuai
		Output	Baku mutu limbah cair	a. BOD < 30 mg/l	Sesuai	sesuai	sesuai
				b. COD < 80 mg/l			
				c. TSS < 30 mg/l			
				d. PH 6-9			

9	Administrasi dan manajemen	Input	Kelengkapan pengisian jabatan sesuai persyaratan jabatan	≥ 90 %	90%	≥ 90 %	≥ 90 %
			Adanya peraturan karyawan	Ada	Ada	ada	ada
			Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan	Ada	Ada	ada	ada
		Proses	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan	100%	100%	100%	100%
			Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	100%	100%
			Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	100%	100%
			Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%	100%
			Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap	≤ 1 jam	15 menit	15 menit	15 menit
		Output	<i>Cost recovery</i>	≥ 20 %	24%	≥ 20 %	≥ 20 %
			Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	100%	100%
			Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam/ tahun	≥ 60 %	35%	≥ 60 %	≥ 60 %
			Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	100%	100%

10. Pelayanan.....

10	Pelayanan ambulans	Input	Ketersediaan pelayanan ambulans/mobil Puskesmas keliling	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
			Penyedia pelayanan ambulans/mobil Puskesmas Keliling	supir ambulans terlatih	Terlatih	terlatih	terlatih
		Proses	Kecepatan memberikan pelayanan ambulans	≤ 30 menit	25 menit	25	25
			Waktu tanggap pelayanan ambulans kepada masyarakat yang membutuhkan	≤ 30 menit	30 menit	30	30
		Output	Tidak terjadinya kecelakaan ambulans	100%	100%	100%	100%
		Outcome	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	85%	85%	85%
11	Pemeliharaan Sarana	Input	Adanya Penanggung Jawab sarana pelayanan	Ada SK Ka.Puskesmas	Ada	ada	ada
		Output	Ketepatan waktu kalibrasi alat	100%		100%	100%
			Alat ukur dan alat laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu	100%	100%	100%	100%
12	Pencegahan dan pengendalian infeksi	Input	Ketersediaan APD	≥60 %	60%	80%	80%
		Proses	Penggunaan APD saat melaksanakan tugas	100%	100%	100%	100%

## 4. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Per Program

TUJUAN	PROGRAM						
	URAIAN	2021		2022		2023	
		Pendapatan	Belanja	Pendapatan	Belanja	Pendapatan	Belanja
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	32,025,000	4,475,000	32,345,250	32,345,250	32,668,703	32,668,703
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1,500,000	0	1,515,000	1,515,000	1,530,150	1,530,150
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	159,047,940	89,095,000	160,638,419	160,638,419	162,244,804	162,244,804

Pengambilan.....

Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	900,000	0	909,000	909,000	918,090	918,090
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	245,850,000	85,470,000	248,308,500	248,308,500	250,791,585	250,791,585
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	16,800,000	16,800,000	16,968,000	16,968,000	17,137,680	17,137,680
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	29,700,000	29,700,000	29,997,000	29,997,000	30,296,970	30,296,970
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7,600,000	5,200,000	7,676,000	7,676,000	7,752,760	7,752,760
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	6,400,000	6,400,000	6,464,000	6,464,000	6,528,640	6,528,640
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	4,800,000	4,800,000	4,848,000	4,848,000	4,896,480	4,896,480

Pengelolaan.....

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7,500,000	7,500,000	7,575,000	7,575,000	7,650,750	7,650,750
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,590,000	4,590,000	4,635,900	4,635,900	4,682,259	4,682,259
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18,900,000	5,100,000	19,089,000	19,089,000	19,279,890	19,279,890
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3,000,000	3,000,000	3,030,000	3,030,000	3,060,300	3,060,300
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	75,625,000	0	76,381,250	76,381,250	77,145,063	77,145,063
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	18,400,000	18,400,000	18,584,000	18,584,000	18,769,840	18,769,840

GAMBARAN.....

GAMBARAN KEGIATAN PER PROGRAM UPTD PUSKESMAS LUMPUE  
TABEL PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PARAMETER	SATUAN	Output/Tahun			KET
						2021	2022	2023	
1	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	orientasi kader posyandu	Terlaksananya orientasi kader posyandu	Kali	6	6	6	
		BIDANG KESEHATAN	Pertemuan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Stunting Tk.Kecamatan	Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Stunting Tk.Kecamatan	Kali	1	2	2	

Pembinaan.....

			Pembinaan Posyandu, Posbindu dan Pos UKK	Terlaksananya Pembinaan Posyandu, Posbindu dan Pos UKK	Kali	28	50	75	
--	--	--	---	--	------	----	----	----	--

TABEL PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN  
MASYARAKAT (Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular)

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PARAMETER	SATUAN	Output/Tahun			KET
						2021	2022	2023	
1	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Upaya Berhenti Merokok untuk Penerapan KTR di Kelurahan dan Kecamatan	Terlaksananya Upaya Berhenti Merokok untuk Penerapan KTR di Kelurahan dan Kecamatan	Kali	4	6	7	

Orientasi.....

			Orientasi Upaya Berhenti Merokok untuk Penerapan KTR di Puskesmas	Terlaksananya Orientasi Upaya Berhenti Merokok untuk Penerapan KTR di Puskesmas	Kali	1	1	1	
			Penyediaan Bahan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi	Terlaksananya Penyediaan Bahan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi	Kali	1	1	1	
			Koordinasi Lintas Sektor Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Kelurahan	Kali	6	6	6	

			Monitoring dan Bimbingan Teknis Kader Kesehatan oleh Petugas Puskesmas	Terlaksananya Monitoring dan Bimbingan Teknis Kader Kesehatan oleh Petugas Puskesmas	Kali	6	6	6	
			Pemberantasan Sarang Nyamuk	Terlaksananya Pemberantasan Sarang Nyamuk	Kali	6	6	12	
			Pertemuan Berkala Kader Kesehatan Program P2P	Terlaksananya Pertemuan Berkala Kader Kesehatan Program P2P	Kali	1	2	2	
			BIAS Campak di Sekolah	Terlaksananya BIAS Campak di Sekolah	Kali	34	34	40	
			BIAS DT/TD di Sekolah	Terlaksananya BIAS DT/TD di Sekolah	Kali	34	34	40	
			Deteksi dini Faktor Resiko PTM di Posbindu dan Pos Lansia	Terlaksananya Deteksi dini Faktor Resiko PTM di Posbindu dan Pos Lansia	Kali	36	36	36	

Deteksi.....

			Deteksi dini kasus HIV/AIDS, TBC, Hepatitis, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya pada Ibu Hamil dan Kelompok Beresiko	Terlaksananya Deteksi dini kasus HIV/AIDS, TBC, Hepatitis, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya pada Ibu Hamil dan Kelompok Beresiko	Kali	55	55	70	
			Deteksi dini Penyakit Menular di Pasar	Terlaksananya Deteksi dini Penyakit Menular di Pasar	Kali	40	40	40	
			Imunisasi Rutin di Posyandu	Terlaksananya Imunisasi Rutin di Posyandu	Kali	336	336	336	
			Koordinasi Lintas Sektor	Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor	Kali	2	2	2	
			Pendampingan Penderita Penyakit Menular Menahun	Terlaksananya Pendampingan Penderita Penyakit Menular Menahun	Kali	30	30	40	

Penemuan.....

			Penemuan Kasus Kontak TB dan Kasus Mangkir, Kasus Kontak Kusta serta orang dengan Gangguan Jiwa serta penyakit lainnya	Terlaksananya Penemuan Kasus Kontak TB dan Kasus Mangkir, Kasus Kontak Kusta serta orang dengan Gangguan Jiwa serta penyakit lainnya	Kali	55	55	55	
			Survei anak sekolah dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit	Terlaksananya Survei anak sekolah dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit	Kali	34	34	40	
			Sweeping BIAS	Terlaksananya Sweeping BIAS	Kali	34	34	34	
			Sweeping Imunisasi Bayi yg tdk ke Posyandu	Terlaksananya Sweeping Imunisasi Bayi yg tdk ke	Kali	24	24	24	

TABEL.....

TABEL PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat)

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PARAMETER	SATUAN	Output/Tahun			KET
						2021	2022	2023	
1	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Edukasi, konseling PMBA, ASI Eksklusif dan Gizi Seimbang di Posyandu	Terlaksananya Edukasi, konseling PMBA, ASI Eksklusif dan Gizi Seimbang di Posyandu	kali	28	28	38	
			Konseling / edukasi gizi seimbang di Kelurahan	Terlaksananya Konseling / edukasi gizi seimbang di Kelurahan	kali	6	6	6	
			Pemantauan Tumbuh Kembang Balita /SDIDTK	Terlaksananya Pemantauan Tumbuh Kembang Balita /SDIDTK	kali	336	336	336	

Penimbangan.....

			Penimbangan Rutin Balita	Terlaksananya Penimbangan Rutin Balita	kali	336	336	336	
			Sweeping Balita yg tdk ke Posyandu	Terlaksananya Sweeping Balita yg tdk ke Posyandu	kali	113	113	113	

TABEL PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin)

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PARAMETER	SATUAN	Output/Tahun			KET
						2021	2022	2023	
1	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kunjungan rumah dan Edukasi P4K	Terlaksananya Kunjungan rumah dan Edukasi P4K	kali	82	82	100	

Pelacakan.....

			Pelacakan dan Pendampingan kasus Ibu dan Bayi dengan Faktor Resiko dan Komplikasi	Terlaksananya Pelacakan dan Pendampingan kasus Ibu dan Bayi dengan Faktor Resiko dan Komplikasi	kali	50	50	60	
			Penemuan Kasus Kematian WUS, Ibu dan Bayi serta pelaksanaan autopsy verbal	Terlaksananya Penemuan Kasus Kematian WUS, Ibu dan Bayi serta pelaksanaan autopsy verbal	kali	10	10	10	

TABEL.....

TABEL PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN  
MASYARAKAT (Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil)

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PARAMETER	SATUAN	Output/Tahun			KET
						2021	2022	2023	
1	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pendataan dan Pemutakhiran Data KIA dan GIZI	Terlaksananya Pendataan dan Pemutakhiran Data KIA dan GIZI	kali	32	32	32	

TABEL PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN  
MASYARAKAT (Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA)

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PARAMETER	SATUAN	Output/Tahun			KET
						2021	2022	2023	
1	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Konseling dan Deteksi Dini Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza	Terlaksananya Konseling dan Deteksi Dini Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza	kali	36	36	42	

Pendampingan.....

			Pendampingan penderit gangguan jiwa dan napza	Terlaksananya Pendampingan penderit gangguan jiwa dan napza	kali	30	30	40	
--	--	--	---	---	------	----	----	----	--

TABEL PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga)

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PARAMETER	SATUAN	Output/Tahun			KET
						2021	2022	2023	
1	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pemeriksaan kebugaran Jasmani tk.kecamatan	Terlaksananya Pemeriksaan kebugaran Jasmani tk.kecamatan	kali	2	2	2	

Pemeriksaan.....

			Pemeriksaan kesehatan berkala dan pengukuran obesitas di Kelurahan	Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan berkala dan pengukuran obesitas di Kelurahan	kali	6	6	6	
			Pemeriksaan Kesehatan berkala di Pos UKK	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan berkala di Pos UKK	kali	52	52	75	

TABEL PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Pelayanan Kesehatan Lingkungan)

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PARAMETER	SATUAN	Output/Tahun			KET
						2021	2022	2023	
1	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pendataan Sarana Sanitasi	Terlaksananya Pendataan Sarana Sanitasi	kali	18	18	18	

TABEL.....

TABEL PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar)

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PARAMETER	SATUAN	Output/Tahun			KET
						2021	2022	2023	
1	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pemeriksaan Kesehatan Anak Sekolah, TTD Rematri, Edukasi Gizi Seimbang dan Kesehatan Reproduksi, Pemeriksaan Lingkungan Sehat	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Anak Sekolah, TTD Rematri, Edukasi Gizi Seimbang dan Kesehatan Reproduksi, Pemeriksaan Lingkungan Sehat	kali	63	63	63	

BAB VI  
PROSEDUR PELAKSANAAN

A. Pengorganisasian dan Prosedur Pelaksanaan Program

Struktur organisasi Puskesmas Lumpue terdiri dari :

1. Kepala UPTD
2. Sub. Bag Tata Usaha dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD
3. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. Tenaga fungsional yang ada di Puskesmas Lumpue terdiri dari :
  - a. Dokter Umum
  - b. Perawat Umum
  - c. Dokter Gigi
  - d. Perawat Gigi
  - e. Bidan
  - f. Analis
  - g. Nutrisionis
  - h. Sanitarian
  - i. Promosi Kesehatan
  - j. Surveilans

Kelompok jabatan fungsional terbagi menjadi 2 kelompok berdasarkan jenis sasaran pelayanan, yaitu Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).

Adapun uraian tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Kepala UPTD
  - a. Kepala UPTD melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
  - b. Kepala UPTD mengkoordinir semua pelaksanaan kegiatan program Puskesmas.
  - c. Kepala UPTD bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan Puskesmas.
  - d. Kepala UPTD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten.

2. Subbagian.....

---

## 2. Subbagian Tata Usaha

### a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- 1) Menyelenggarakan urusan umum
- 2) Menyelenggarakan masalah kepegawaian
- 3) Menyelenggarakan urusan keuangan
- 4) Menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan

### b. Subbagian Tata usaha mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana kerja program
- 2) Perumusan kebijakan teknis ketatausahaan
- 3) Penyelenggaraan urusan umum
- 4) Penyelenggaraan urusan kepegawaian
- 5) Penyelenggaraan urusan keuangan
- 6) Penyelenggaraan evaluasi dan penilaian kinerja program
- 7) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi
- 8) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja subbagian Tata Usaha.

## 3. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Puskesmas yang meliputi : upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan.

### a. Upaya Kesehatan Wajib meliputi :

- 1) Upaya Promosi Kesehatan
- 2) Upaya Kesehatan Lingkungan
- 3) Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana
- 4) Upaya Perbaikan Gizi masyarakat
- 5) Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
- 6) Upaya Pengobatan

### b. Upaya Kesehatan Pengembangan meliputi :

- 1) Upaya Kesehatan sekolah
- 2) Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat.
- 3) Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut
- 4) Upaya Kesehatan Jiwa
- 5) Upaya Kesehatan Usia Lanjut
- 6) Upaya Kesehatan Mata
- 7) Upaya Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)

B. Penanggung.....

---

## B. Penanggung Jawab Program

Program di puskesmas Lumpue terdiri dari 8 program yang masing-masing program memiliki penanggung jawab yang akan bertanggung jawab atas program. Berikut ini adalah nama penanggung jawab beserta programnya

- 1) Irnawaty, SKM.,M.Kes : Pelayanan Kesehatan
- 2) Dewi Sartika, Amd.Keb : Promosi Kesehatan
- 3) Hj. Andi Rukmini, A.Md.Keb : Kesehatan Ibu dan Anak
- 4) Rosdiana, S.ST : Kesehatan Lingkungan
- 5) Irmawati Amar, Amd : Gizi
- 6) Abd. Samad, AMK : Korim
- 7) Mahadir Muhammad, SKM : Surveilans
- 8) Andi Hamsiar, S.Kep. Ns : Kesehatan Jiwa
- 9) Hj. Mahawiah, S.Kep : Kesehatan Haji
- 10) Herna Gaffar, S.Kep : Pengelola TB

## C. Sistem dan Mekanisme Evaluasi Serta Revisi RSB

Rencana Strategi Bisnis Puskesmas ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Rencana Strategi Bisnis Puskesmas sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organ Puskesmas serta perubahan lingkungan

BAB VII  
PENUTUP

Rencana Strategis Bisnis Puskesmas menjadi komitmen kinerja yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran yang ada di Puskesmas dan dijabarkan dalam bentuk Rencana Bisnis Anggaran dan Penetapan Kinerja sebagai alat komitmen kepada Kepala Daerah.

Rencana Bisnis Anggaran dan Penetapan Kinerja yang merupakan turunan dari Rencana Strategis Bisnis dengan target tahunan yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh jajaran Puskesmas dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan tujuan kepuasan pelanggan karena dengan status BLUD kita punya komitmen untuk mencapai kepuasan pelanggan demi untuk mempertahankan *customer loyalty*.

Hasil implementasi perencanaan tersebut akan dilakukan evaluasi kinerja internal dan akan dilaporkan selain kepada Kepala Daerah juga kepada publik dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdiklat BPKP sehingga seluruh pihak dapat mengakses akuntabilitas Puskesmas dengan mudah.

WALI KOTA PAREPARE

TTD

TAUFAN PAWE

---